

DISKURSUS FEMINISME TRANSNASIONAL: PENGARUH INTERSEKSIONALITAS DALAM AGENDA KEAMANAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA

Rini Afriantari
Universitas Pasundan
rini.afriantari@unpas.ac.id

Doi:

Abstract

The emergence of feminism after global political depolarization after September 11, 2001, has a strategic role in designing the security agenda of a sovereign country with the emergence of the intersexional paradigm. In Southeast Asia, the excitement of the securitization of the non-traditional security agenda sprang up among regional authorities. Unfortunately, the security depolarization agenda is not followed by gender analysis where the state still uses realism among patriarchal global political hierarchies and excludes women in the global political arena. In this paper, the author will analyze how intersexuality in the agenda of human security in Southeast Asia emphasizes the discourse of transnational feminism.

Keywords: *Transnational feminism, intersexionality, human security & South East Asia.*

Abstrak

Munculnya feminisme setelah depolarisasi politik global 11 September 2001, memiliki peran strategis dalam merancang agenda keamanan negara berdaulat dengan munculnya paradigma interseksional. Di Asia Tenggara, sekuritisasi agenda keamanan non-tradisional bermunculan di kalangan otoritas regional. Sayangnya, agenda depolarisasi keamanan tidak diikuti oleh analisis gender di mana negara masih menggunakan realisme di antara hierarki politik global patriarkal dan mengecualikan perempuan di arena politik global. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis bagaimana interseksionalitas dalam agenda keamanan manusia di Asia Tenggara menekankan wacana feminisme transnasional.

Kata Kunci: *Feminisme Transnational, intersexionality, human security & Asia Tenggara.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemerosotan dominasi realisme dalam dinamika politik internasional bukan lagi berupa fenomena transisi paradigm studi Hubungan Internasional yang artifisial. Perspektif yang masih normatif dalam menganalisis relasi kekuatan (*power*) global, turut memberikan sumbangsih atas statisnya

paradigma tunggal dalam mengkonsepsikan struktur keamanan global di level sistem dan Negara (Wolfers, 1962:147-165). Kemunculan feminisme pasca depolarisasi politik global setelah 11 September 2001, memiliki peran strategis dalam mendesain agenda keamanan sebuah negara berdaulat dengan munculnya paradigma interseksional. Sayangnya,

konstruksi keamanan di bilik kedaulatan negara hanya berada pada kategori abstrak seperti 'negara' atau 'sistem' tanpa keterkaitan yang signifikan terhadap aktor non-negara. Walaupun kecenderungan agenda keamanan terpusat pada keamanan non-tradisional, alih-alih diberdayakan, warga negara (*non-state actor*) tak lebih dari objek elit negara untuk mendemokratisasikan pembuatan kebijakan luar negeri (Hill, 1999). Hal ini valid, sebab diskursus-diskursus agenda keamanan di negara-negara kawasan Asia Tenggara sangat ditentukan oleh kelas penguasa atau elit.

Representasi keamanan non-tradisional tersebut memiliki keterbatasan: sebab belum dapat keluar dari interpretasi penggunaan *power* negara (Wolfers, 1962). Atribut-atribut yang melingkupi proses sekuritisasi, merujuk pada Buzan (1983) hanya memiliki fokus pada agenda negara yang sentralistik. Apabila diproyeksikan ke luar, untuk mendapat jaminan stabilitas keamanan maka indikatornya berada pada integrasi keamanan berupa pakta atau koalisi sebagai bentuk *counter balance* dari kemunculan kekuatan revisionis. Sedangkan, apabila diproyeksikan ke dalam, hanya akan bertumpu pada rezim politik dan elit yang berkuasa (Greenwood & Waever, 2013). Pada akhirnya, agenda-agenda sekuritisasi keamanan dalam kebijakan non-politik di wilayah Humanitarian (Hak Asasi Manusia) tidak lebih dari distorsi keamanan tradisional yang masih berjibaku dengan entitas kedaulatan. Asumsi lainnya, apabila negara memiliki justifikasi untuk mengoperasionalkan kekuatan yang abusif maka kecenderungan negara sebagai opresor (*penindas*) terhadap keamanan manusia (*human security*), sangat mungkin terjadi.

Human Security sendiri secara eksplisit mengalihkan tujuan keamanan

pada individu terlepas dari kewarganegaraan mereka (Glasius, 2008). Keamanan manusia biasanya berarti kebebasan dari rasa takut dan keinginan, atau lebih khusus "perlindungan dari ancaman penyakit, kelaparan, pengangguran, kejahatan, konflik sosial, represi politik dan bahaya lingkungan." (UNDP 1994, 22-23) Singkatnya, peralihan agenda keamanan tidak lagi terjebak pada kompetisi geopolitik—di Asia Tenggara, agenda-agenda transnasional secara etis berkonsentrasi pada Hak Asasi Manusia (Garcia, 2015).

Kontribusi feminisme dalam menginterpretasikan kembali kekuasaan membuktikan bahwa *power* bukan hanya apa yang dikeluarkan dari moncong senjata atau sebatas para petinggi dunia yang melakukan deklarasi. Lebih dari itu, pervasivitas kekuasaan yang erat kaitannya dengan kesenjangan gender dan hierarki antara laki-laki dan perempuan telah mendiskriminasi peran perempuan dari bidang politik dan sosioekonomi global (Enloe, 1977).

Ketidakmampuan negara dalam mengakomodasi disparitas tersebut, selain mewarnai transisi keamanan yang lebih lunak, telah memicu pergerakan feminisme global atau dapat disebut "women's movement". Proses pembingkaihan isu-isu perempuan utamanya dalam memperjuangkan kesetaraan gender, ikut mendiskusikan gejolak yang diakibatkan globalisasi ekonomi, neokolonialisme, seksisme global dan rasisme melewati batas-batas negara (Moghadam, 2005; Naples dan Desai, 2002).

Di kawasan Asia Tenggara sendiri, mobilisasi sosial terhadap kepekaan isu- isu gender kontemporer memiliki catatan yang tidak jelas dan menjadi kawasan paling tertinggal

dalam pergerakan feminisme (Piper & Uhlin, 2004:1). Sikap apriori komunitas masyarakat regional tersebut tak lepas dari fenomena *regional supercomplex*: dipengaruhi oleh ragam identitas, norma dan konstruksi sosial budaya yang homogen namun secara bersamaan tidak dapat mengakomodasi integrasi kawasan dalam bentuk satu identitas (dalam hal ini adalah ASEAN). Namun, di sisi berlawanan muncul kesadaran inter-subjektif dalam membangun agenda ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan di Asia Tenggara yang disebabkan oleh hegemoni gender. Justru rekonstruksi identitas yang paling signifikan dicanangkan, berhasil dipelopori oleh jaringan gerakan transnasional feminisme yang selama ini dieksklusikan dari negara oleh sistem pemerintahan global yang patriarki.

Pergerakan feminisme transnasional, sebagai respons gerakan sosial (*social movement*) dalam bentuk koalisi dan kolektif yang beroperasi secara empiris juga ikut membangun infrastruktur keamanan di skala mikro. Diskursus keamanan skala mikro ini menjadi fenomena yang kontinyu. Sehingga sekuritisasi keamanan manusia sangat didasarkan pada mobilisasi kelas di level individu dan komunitas akar rumput (Caouette, 2006). Menariknya, proses diskursus keamanan dimana perempuan sebagai korban dinamika politik kawasan yang tradisional memudahkan proses sekuritisasi lintas negara. Jejaring pergerakan transnasional ini menjadi katalisator negara berdaulat, sekaligus membuka ruang untuk lebih menggeser kekuatan (*force*) dalam setiap penyelesaian masalah kesehatan, baik migrasi tenaga kerja legal maupun ilegal (termasuk pekerjaan rumah tangga, seks dan hiburan) dan perdagangan telah menjadi tema sentral yang mengarah

pada pembentukan jaringan pergerakan sosial transnasional di level institusi ataupun organisasi non- pemerintahan (NGOs).

Ragam agenda yang disuguhkan dalam konstruksi keamanan manusia di Asia Tenggara tak jarang mengeksklusikan perempuan dari proses pembentukan desain keamanan regionalnya. Termarjinalkannya perempuan dalam agenda keamanan manusia, menjadi titik balik terhadap ilmu Hubungan Internasional ketika meninjau kembali kerangka analisis terhadap *power politics* yang defisit perspektif gender. Alhasil perempuan menjadi kelompok marjinal pada tatanan politik yang anarki dengan identitas negara yang cenderung maskulin dan homogen.

Secara empiris, parapenstudi neorealis dan neoliberal telah membuat perempuan 'absen' dari penyelidikan agenda keamanan sekaligus bertransformasi menjadi struktur yang opresif terhadap perempuan itu sendiri (Stearnagel 1990 79-80). Kesalahpahaman agenda keamanan struktural (patriarki) ini, menimbulkan bias yang telah menjadikan perempuan sebagai korban dari agresi mikro kebijakan politik serta restriksi terhadap kesetaraan akses sosio- ekonomi di wilayah sistem pemerintahan global. Sehingga diskursus pergerakan feminisme transnasional sebagai aktor non-negara menjadi sebuah telaah yang empiris ketika hendak mengkaji pola-pola rekonstruksi keamanan di Asia Tenggara.

Penulisan *paper* berikut ini bertujuan untuk menjewantahkan prose pergerakan feminisme transnasional dalam mengkonstruksi agenda keamanan manusia, khususnya dalam konteks agresi mikro berbasis gender di Asia Tenggara. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penulisan makalah ini

adalah: mengetahui bagaimana proses pergerakan feminisme transnasional dalam diskursus ancaman agresi mikro berbasis gender pada agenda keamanan manusia di Asia Tenggara.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Feminisme Empirik

Paradigma feminisme empirik menitikberatkan atensi pada keterkaitan antara perempuan dan gender sebagai analisis empiris dalam studi Hubungan Internasional. Anggapan bahwa perempuan masih dieksklusikan dari pengalaman politik global telah mempersempit cara pandang studi Hubungan Internasional yang dihegemoni oleh perspektif maskulin yang seksis (Halliday, 1988). Misinterpretasi di tengah kajian politik global tersebut, secara senonoh memukul rata bahwa asumsi atas pengalaman laki-laki sama dengan pengalaman perempuan dalam proses aktivitas politik global. Hal tersebut menjadi sangat tidak relevan apabila seting agenda perempuan di dalam politik global masih difokuskan pada konflik, sistem anarki serta perangkat ketakutan dalam memformulasikan agenda keamanan global (Grant and Newland, 1991: 5).

Sejak tahun 1990, feminisme empirik berfokus pada keberagaman metodologi dan substansi studi Hubungan Internasional pada rubrik *women in international development* (WID) serta *gender and development* (GAD). Agenda tersebut telah mendokumentasikan bagaimana bias laki-laki dalam proses pembangunan telah menggiring proyek serta hasil kebijakan yang buruk dalam pemberdayaan masyarakat (Newland, 1988).

Polarisasi sosial ekonomi telah memperpanjang proses ketidaksetaraan terhadap perempuan di level struktur

global. Jumlah perempuan yang hidup di bawah angka kemiskinan semakin tidak proporsional. Porter & Judd (2000) menyebut dampak struktural globalisasi ini sebagai '*feminisation of poverty*'. Peralihan paradigmatik di wilayah imperatif negara menjadi indikator penting dalam kajian feminisme empirik. Transisi aktivitas negara terhadap penyediaan layanan pasar global, termasuk pendapatan ekspor (*export earnings*), biaya tenaga kerja komparatif (*comparative labor cost*) telah mendorong perempuan untuk memiliki beban domestik yang tidak proporsional (Bakker, 1994).

Tekanan makroskopik di wilayah sistem politik global telah mendorong pergerakan aktivis feminis dalam mewacanakan isu perempuan sebagai gerakan global (*global movement*). Feminisme empirik telah berhasil mendesain format pergerakan solidaritas dan identitas lintas batas seperti *Campaign For Nuclear Disarmament* dan *anti-Western Terrorist Group* (Stienstra, 1994). Agenda-agenda tersebut telah memicu terbentuknya jaringan aktivis perempuan lintas negara dengan aktor *inter-governmental, local governments* dan organisasi perempuan transnasional dengan misi pembangunan atribut legalitas global serta mekanisme kebijakan dalam mempromosikan keadilan gender (Peters & Wolper, 1995).

Paradigma feminisme empirik di dalam makalah komprehensif berikut ini digunakan sebagai kaca mata empirik dalam menelaah relasi antara gender dan perempuan sebagai efek material di dalam agenda politik-ekonomi global yang relevan dalam studi Hubungan Internasional saat ini. Dengan tujuan dekonstruksi paradigma politik global yang mengeksklusikan peran perempuan, diharapkan memberikan

ruang sekuritisasi terutama dalam proses konstruksi agenda keamanan agresi mikro di level trans-nasional.

2.1. Keamanan Manusia (*Human Security*)

Obsesi terhadap agenda kemanan (*security*) di regional Asia menjadi sebuah agenda impulsif setiap negara di dalamnya. *Security dilemma* menjadi sebuah translasi dimana beberapa negara seperti Korea, Vietnam, Cambodia dan Singapura yang trauma dengan perang; Australia terhadap kemunculan kekuatan baru dari Asia dan ASEAN yang dianggap sebagai ancaman tradisional yang orthodox, atau negara-negara ASEAN yang terobsesi dengan keamanan internal (*internal security*); serta posibilitas hegemoni China dengan obsesi mendominasi dalam sosial politik regional (Mahathir, 1997). Dinamika agenda keamanan di Asia Tenggara tersebut tak jauh dari ketatnya konstruksi keamanan regional yang distimulus oleh stabilitas politik regionalnya. Rezim politik domestik yang semakin bergejolak serta kecenderungan mempertahankan status quo sebagai bagian ketahanan nasional.

Aktivitas ketidakamanan (*insecurity*) regional tersebut menjadi sebuah perundungan sistemik dimana negara-negara yang terdampak krisis menjadi resistan. Sehingga penggunaan kekuatan militer sebagai ketahanan nasional diutamakan (Withaya, 2004:9). Kendati cara-cara tradisional yang dioperasionalkan oleh negara-negara di Asia Tenggara jauh dari kata efektif, prasangka atas sentimen ekonomi-politik hari ini memperpanjang kekhawatiran dan ketidakamanan negara di tengah-tengah polemik pasca krisis ekonomi di rentan waktu tertentu (Stoett, 1999:3). Namun, tidak dapat dipungkiri bagaimana prasangka dan

sentimen tersebut telah memeriahkan transisi agenda regional ASEAN. Pada Forum Regional ASEAN yang digelar pada bulan July 1998, secara tidak langsung telah menggeser pemahaman realis, yakni non-intervensi; sekaligus menciptakan diskursus keamanan dengan agenda keamanan manusia seperti AIDS, HAM, korupsi dan perlindungan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand bahwa; “... *the well-being of the Thai people is affected by the own of drugs and refugees from Burma, and by the haze carried on winds from Indonesia ... when we give assistance and candid advice to a neighbor experiencing an environmental crisis, as in Indonesia, we are not interfering in an internal matter, but dealing with a regional threat.*” (Pitsuwan, 2000)

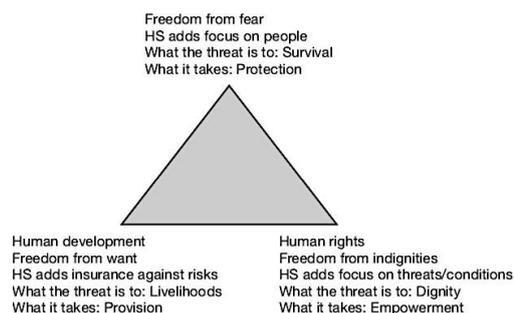
Wacana tersebut apabila ditarik ke akar sejarahnya, diawali dengan Human Development Report pada tahun 1994 oleh PBB dalam *Human Security* dijelaskan bahwa agenda *human security* adalah untuk menjembatani kebebasan dari keinginan (*freedom from want*), dan kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*). Dalam mode sistemik, berikut adalah karakteristik esensial dari pengertian *human security*; (UNDP, 1994)

- *human security* adalah konsep universal yang komprehensif. Dimana konsep tersebut relevan terhadap semua orang di Negara maju dan berkembang;
- komponen utama dari *human security* adalah interdependensi;
- *human security* memiliki konvergensi atas *people-centered* terlebih meninjau aktivitas individu atau komunitas global di dalam masyarakat global baik yang hidup dalam konflik maupun perdamaian.

Kemudian, di tahun yang sama UNDP mendefinisikan *human security* sebagai; aman dari ancaman kronis seperti kelaparan, wabah dan represi; perlindungan terhadap disrupsi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pekerjaan, rumah atau komunitas (Fukuda-Parr, 2003:8).

Kritik terhadap pengertian *human security* pasca diluncurkan oleh PBB, dalam realitas politiknya *human security* sering dianggap sama dengan *human development* ataupun *human rights*. Sirkulasi pemahaman *human security* memiliki porsi-porsi yang berbeda ketika itu digunakan. Seperti agenda- agenda *human security* lainnya, kecenderungan *bandwagoning* atas format keamanan manusia yang diwacanakan oleh aktor non-negara masih berkesinambungan dengan struktur kekuatan regional yang dominan. Bias-bias seperti ini berakar pada pemahaman *human security* pada konteks liberal atau realis semata. Walaupun narasi-narasi *human security* oleh Mahbub Ul Haq bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan melalui senjata, namun tendensi terhadap penyelesaian masalah *human security* masih bergantung pada intervensi kedaulatan senjata dan agresi mikro.

Pada pengertian yang paling sederhana, *human security* bukan hanya menarik pada pencapaian agendanya melainkan mereduksi kemungkinan terburuk dalam transisi politik global seperti: konflik, perang, fluktuasi ekonomi, pemiskinan dan agresi mikro yang dapat menjadi ancaman: tergantung proses diskursus keamanannya (Buzan, 1998: 23-24). Sederhananya dapat diterjemahkan dalam gambar berikut ini:



Sumber: CHS, Human Security Now, 2003.

Relevansi konsep *human security* dan gerakan feminisme di sekat-sekat batas anarki negara, telah mendekonstruksi paradigma bahwa negara merupakan aktor rasional yang egois dan maskulin (Youngs, 2004: 75- 87). Negara dan pasar telah bersama-sama membangun genderisasi dalam politik global dengan tipikal asumsi dan struktur yang maskulin. Negara, sebagai sebuah entitas rasional seolah-olah mengesampingkan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan (Tickner, 2002). Sehingga, kemewahan konflik dan agenda keamanan yang militeristik menjadi sebuah format yang amoral, mengerikan dan opresif bagi partisipasi warga negaranya.

2.2. Interseksional

Interseksional pertama kali diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw (1989) ketika mendiskusikan tentang pekerja wanita kulit hitam di Amerika Serikat. Dalam agenda World Conference Against Racism (WCAR) pada bulan September 2001 di Durban, Afrika Selatan, interseksional adalah: “... recognized the importance of examining the intersection of multiple forms of discrimination, including their root causes from a gender perspective.”

(ResolutionE/CN.4/2002/L.59)

Diskursus mengenai interseksional yang melibatkan kategori

gender, kelas sosial dan ras diidentifikasi sebagai gabungan subordinasi dan *triple oppression* (Brah and Phoenix, 2004). Cara pandang interseksional percaya pada akar ontologis sebuah divisi sosial. Tak ada yang lebih menderita dari dampak *triple oppression* yang menimpa perempuan. Selain tiga indikator yang disebutkan sebelumnya konstruksi lainnya yang mempengaruhi lapisan-lapisan opresi di level sistemik dipengaruhi oleh faktor yang acap kali diklaim sebagai ancaman politik identitas (Brubaker & Rogers, 2000: 34- 67). Dari kondisi marjinal, penyelewengan terhadap status politik identitas yang dituduhkan kepada kelompok minoritas sangat menggantungkan diri pada pendekatan interseksional dalam merekonstruksi agenda-agenda yang menindas tersebut. Secara fundamental, penekanan pada analisis identitas dibedakan dari penekanan struktural. Pendekatan interseksional ketidakberdayaan perempuan yang termarginalkan dengan berusaha menangkap keterkaitan ragam subordinasi. Selain itu, keterkaitan interseksional tersebut menganalisis identitas berdasarkan format subordinasi sebagai individu dan komunal (CWGL, 2001).

PEMBAHASAN

3.1. Feminisme Transnasional

Dalam konteks paling sederhana, aktivis transnasional diidentifikasi sebagai gerakan sosial (*social movement*) serta gerakan masyarakat sipil lainnya dalam ruang lingkup organisasi atau individual yang beroperasi melewati lintas batas negara (Piper & Uhlin, 2004: 4-5). Definisi tersebut dibenarkan oleh spesialis gerakan sosial yakni, Della Porta & Tarrow yang mereferensikan sebagai *transnational collective action*. Selain itu asumsi lainnya dari Della Porta & Tarrow sebagai: “*the*

coordinated international campaigns on the part of networks of activists against international actors, other states, or international institutions.” (Della Porta & Tarrow, 2005:7).

Rezim pergerakan kolektif transnasional menjadi disrupsi terhadap pergeseran aktivitas dari pergerakan masyarakat yang *state-centric*. Variabel-variabel yang koheren dan menjadi indikator terhadap pergeseran paradigma tersebut didasari tiga hal berikut ini;

1. internasionalisasi yang kompleks akibat kepadatan institusi internasional, rezim dan kontak antara pejabat negara dan aktor non-negara serta multiplikasi hubungan antara loka (Tarrow, 2005:8).
2. peluang politik multi-level yang diciptakan oleh interaksi antara internasionalisasi yang kompleks dan struktur domestik, yaitu; fitur institusional negara, masyarakat, dan hubungan negara-masyarakat (Risse dan Kappen, 1995:20).
3. Munculnya lapisan aktivis yang paling baik digambarkan sebagai bentuk kosmopolitan yang berakar (Tarrow, 2005:34).

Faktor-faktor lainnya yang memicu kemunculan aktivisme transnasional juga disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan internasional, seperti:

- a) runtuhnya blok Uni Soviet yang memicu keterbukaan akses non-negara,
- b) perluasan akses informasi dan mobilisasi internasional yang murah telah memungkinkan pergerakan yang sebelumnya terisolasi menjadi mungkin untuk melakukan kolaborasi,
- c) meningkatnya peran aktor internasional dalam agenda multinasional yang diilustrasikan

secara khusus oleh kekuatan yang tumbuh dari perusahaan transnasional (Della Porta & Tarrow, 2005: 7-8).

Della Porta & Tarrow (2005) juga menekankan bagaimana perubahan kognitif menjadi faktor penyebab lainnya. Aktivisme dan gerakan sosial merupakan aktor reflektif yang telah berkontribusi dalam melembagakan pengalaman internasional mereka dianalisis secara kritis. Yang terakhir, adalah bagaimana lembaga internasional ikut berperan mekanisme relasional di level horizontal (Della Porta & Tarrow, 2005: 9-10).

Berkaitan dengan preferensi pergerakan aktivisme transnasional tersebut, pergerakan feminisme sendiri telah berevolusi sebagai sebuah set tanggapan terhadap diskriminasi berkelanjutan dan penderitaan perempuan di seluruh dunia seperti agenda the United Nation's (UN) untuk empat World Conference on Woman, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan bentuk kampanye lainnya untuk reformasi hukum dan hak-hak sipil lainnya. Sayangnya, koalisi pergerakan feminisme lintas batas memiliki tantangan dalam melibatkan pengakuan dari konteks dan prioritas yang berbeda. Proses disrupsi wacana feminisme dalam agenda keamanan manusia tersebut sangat bergantung pada proses pembentukan TFN (*Transnational Feminism Network*) di Asia Tenggara.

3.2. Pergerakan Feminisme Transnasional di Asia Tenggara

Di Asia Tenggara, ada kecenderungan yang berkembang untuk berorganisasi dan bekerja secara transnasional. Seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang tak henti-hentinya

menjamu berbagai bentuk organisasi aktivis transnasional. Meskipun ada kesepakatan yang relatif mengenai hal ini, memahami maknanya serta dampaknya pada proses politik, tetap terbuka untuk interpretasi (Hewinson, 2001). Hari ini, Bangkok, Manila, dan Jakarta bertindak sebagai "*nodes of transnational activism*", tempat-tempat yang tidak hanya menyediakan infrastruktur praktis yang diperlukan oleh jaringan transnasional, tetapi juga iklim politik yang tidak terlalu bermusuhan dengan aktivisme masyarakat sipil (Piper dan Uhlir, 2004: 14, lihat juga bab Johan Lindquist, 109-128).

Piper dan Uhlir (2004: 19) mengasumsikan bahwa perubahan demokratisasi di wilayah tersebut telah memicu peningkatan aktivisme masyarakat sipil serta perkembangan NGO transnasional walaupun secara numerik belum signifikan wilayah lain di Eropa atau Amerika. Di regional Asia Tenggara sendiri, identitas 'feminist' sebagai aktor non-negara tidak menemui fakta komprehensif dalam menghomogenisasi identitas gender di Asia Tenggara.

Fourth World Conference on Women yang dilaksanakan di Beijing pada tanggal 4-15 September 1995 mencanangkan platform aksi yang bersinggungan dengan agenda *human security* terhadap perempuan. Namun, platform aksi tersebut tidak relevan apabila melihat lapisan-lapisan opresi dengan identitas yang beragam di Asia Tenggara. Contoh yang kontras, dapat ditinjau dengan karakteristik identitas dan isu yang beredar di akar rumput pergerakan feminisme di beberapa negara, misalnya Association of Women for Action and Research (AWARE) pada tahun 1985. AWARE untuk tetap beroperasi di bawah tekanan politik domestiknya, membuat mereka harus

berada pada motif non-politik sehingga menghindari klaim sebagai organisasi feminis (AWARE, 1990). AWARE secara signifikan memperjuangkan permasalahan yang dihadapi laki-laki dan perempuan dalam realitas gender seperti diskriminasi dan sub-ordinasi.

Di Thailand lebih berfokus pada isu pekerja wanita. Contohnya Red Unalom Society of Siam saat ini The Thai Red Cross Society) yang berkonsentrasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di bawah tekanan operasi politik konservatif dan kebijakan kapitalistik (Tantiwiramanond & Pandey, 1991).

Sedangkan di Indonesia yang mendapat tekanan kolonialisme Belanda kita mengetahui Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) yang terbentuk pada tahun 1950-an. GERWANI lebih masif pergerakannya sebab berada pada gejolak tekanan otoritarian politik pasca kemerdekaan.

Realitas interseksional yang kompleks di antaranya tekanan buruh wanita, korban kolonialisme, kesehatan ibu serta konstitusi opresif yang militeristik membuat GERWANI menjadi progresif karena dianggap sebagai ancaman mobilisasi publik di akar rumput untuk menentang pemerintah (Wieringa, 1998; 19-20).

3.3. Disrupsi Feminisme dalam Agenda Human Security

Merujuk pada diskursus identitas sebagai 'orang Asia', pergerakan feminisme di negara-negara Asia Tenggara selalu berbenturan dengan konstruksi nilai publik terhadap feminisme itu sendiri. Stigma terhadap pergerakan feminisme di ranah domestik, selalu bermasalah dengan situasi konservatisme di tengah-tengah gejolak politik domestik.

Minimnya penggunaan perspektif interseksional dalam membangun

agenda-agenda kemanaan non-tradisional menjadi gejolak disrupsi tersendiri. Merujuk pada ASEAN Committee on Woman (ACW) perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender di ASEAN difokuskan pada beberapa indikator seperti; *sex balance population, Human Development Index, Gender Inequality Index*, pendidikan, partisipasi tenaga kerja wanita, serta partisipasi politik (ASEAN, 2009).

Transaksi agenda *human security* didorong oleh tekanan global seperti CEDAW dan politisasi kekerasan domestik menjadi proteksi individual yang legal. Bagaimana paradigma diskriminatif negara direduksi dengan kemunculan *Third World Network* (TWN) oleh gerakan feminime dalam mengkonsepkan kembali agenda keamanan di Asia Tenggara. Advokasi oleh TWN, berhasil mempromosikan ratifikasi kebijakan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand dalam meninjau kembali ketidakberdayaan perempuan dalam proses globalisasi (Loh, 2005 and 2004; Trocki, 1996; Verma, 2002; Weiss, 2004).

Peran sentral TWN dalam diskursus agenda *human security* dapat melihat aktivitas Focus on the Global South (dibentuk di Bangkok, Thailand pada tahun 1993-94) dalam mengkonsolidasikan agenda-agenda masyarakat sipil yang mikroskopis, dan menghubungkannya dengan jejaring regional (ASEAN, APEC & ASEM) untuk menginsersi isu-isu di akar rumput (Filomena, 1999: 6). Focus memiliki dua faktor dalam membangun perangkat konsolidasi intersubjektifitas indigenous di akar rumput dan materi eksogenous seperti krisis finansial dalam gerakan anti-globalisasi di level institusi regional.

Walaupun mobilisasi kepentingan masyarakat sipil secara kolektif telah

membentuk kesadaran baru di level regional, sayangnya interseksionalitas yang mencakup kesetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan masih dalam porsi yang sangat terbatas. Interkonektifitas lokal ke global masih berada dalam kungkungan hierarki patriarki dan kapitalisme yang secara struktural menyebabkan disrupsi terhadap pergerakan feminisme di level regional. Yang apabila meninjau rekonstruksi agenda *human security*, secara patronis masih dalam kerangka realisme dan neoliberalisme.

3.4. Pemberdayaan Perempuan di Asia Tenggara

Bias gender menjadi faktor yang sulit untuk diidentifikasi. Dalam konteks Asia Tenggara, konstruksi keamanan manusia dan pemberdayaan perempuan selalu tarik-menarik dengan norma patriarkal yang berbeda-beda di setiap negaranya. Di Indonesia, ditinjau dari variabel ekonomi yaitu GDP per kapita tertinggi di Asia Tenggara dalam konteks pemberdayaan perempuan Indonesia tidak memiliki perkiraan tinggi terhadap pemberdayaan perempuan (Siegman, 2006).

Pendidikan untuk perempuan di Indonesia sendiri hanya berada pada angka 6,5 tahun ke atas dengan estimasi akses kelas menengah ke atas. Berbanding terbalik dengan Vietnam yang GDP-nya lebih rendah dari Indonesia, memiliki agenda pemberdayaan perempuan yang lebih komprehensif walaupun pertumbuhan ekonomi yang rendah (Kevane & Levine, 2006). Hal tersebut diakibatkan oleh bias gender yang sangat kental dengan perspektif bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan serta terikat dengan adat dan patriarki-normatif yang menjebak perempuan dalam keadaan biner.

Di Filipina, perempuan lebih

menikmati otonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Walaupun dalam situasi penjajahan Spanyol, perempuan Filipina lebih memiliki akses yang egaliter dalam pengambilan keputusan domestik: ketenagakerjaan, kehamilan, kesehatan reproduksi dan partisipasi politik (Sobritchea, 2004). Akses pendidikan bagi perempuan di Filipina menempati rentang angka tertinggi dibandingkan negara lainnya di Asia Tenggara. Mobilisasi pergerakan feminisme di tengah masyarakat sipil di Filipina, telah mempromosikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (Estudillo, 2001). Di dalam kesadaran masyarakat sipil dalam mengkonseptualkan sistem politiknya, Filipina telah berhasil menyematkan sumber daya perempuan, meningkatkan kesadaran sosial dan memprotes konten seksis terhadap media di Filipina.

Apabila melihat dari hasil laporan ACW pada tahun 2011-2015, beberapa poin-poin agenda yang masih menjadi tantangan dalam proyek pemberdayaan wanita di Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

1. struktur ketergantungan usia, perawatan wanita dan pekerjaan yang tidak dibayar (*Unpaid Worker*);
2. kemiskinan berbasis gender;
3. kematian ibu dan layanan reproduksi;
4. penularan HIV-AIDS;
5. sistem pendidikan yang mengordinasikan wanita;
6. kekerasan terhadap wanita dan minoritas seksual. (ACW, 2009)

Apabila merujuk pada agenda regional secara holistik, keluaran dari proyek dan agenda telah mencapai titik diskursus yang hampir mengkristal. Walaupun sebenarnya, disintegrasi antara ketercapaian agenda *human*

security di skala normatif masih sangat bergantung pada situasi institusional anarki negara. Agenda ASEAN melalui ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) dan cetak biru konstruksi ASCC sendiri sudah mengadopsi interseksionalitas. Klaim pesimis, bahwa negara-negara di Asia Tenggara yang sedang gencar mensekritisasi *human security* tidak berada pada level individual melainkan format negara dalam mempromosikan keamanan domestik. Alhasil, gerakan feminisme transnasional tidak akan selalu relevan dengan format atau dokumen agenda yang terekam melalui institusi internasional. Tak dapat dipungkiri bila menelaah agenda- agenda humanitarian di negara-negara di Asia Tenggara, format-format penyelesaian konflik dan insersi feminisme dalam membangun wacana *human security* masih terkendala kekangan rezim domestik yang utilitarian. Oleh karena itu, tugas besar ketercapaian interseksionalitas dalam mendorong diskursus *human security* hanya berada di level negara, sedangkan di satuan individu feminisme belum mencapai kesadaran bagi khalayak komunitas masyarakat di Asia Tenggara.

Kesimpulan

Proses dekonstruksi yang dilakukan oleh gerakan feminisme di Asia Tenggara memiliki pengaruh signifikan. Proses interdependensi dalam menyematkan gender, kelas dan identitas perempuan sebagai realitas politik global sedikit banyaknya mempengaruhi agenda-agenda institusional. Walaupun pada praktiknya, pergulutan di akar rumput mengenai arah pendekatan feminisme dalam pemerintahan global sering bertubrukan dengan situasi politik dan ekonomi yang neorealis dan liberal. Selain itu, kontrak sosial di Asia Tenggara dengan konstruksi konservatisme menambah catatan panjang subordinasi terhadap

wanita; yang notabene hanya sebagai agen non- negara dalam mengupayakan dan mempromosikan kedaulatan. Akhirnya, pergerakan feminisme transnasional hanya beroperasi di bawah payung kekuatan negara dengan strategi advokasi kolektif yang hingga saat ini belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Association of Southeast Asian Nations (2009). *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Bakker, I. (ed.) (1994) *The Strategic Silence: Gender and Economic Policy* (London).
- Buzan, Barry (1983). *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Brighton, Sussex: Wheatsheaf Books.
- Center for Women's Global Leadership (2001) *A Women's Human Rights Approach to the World Conference Against Racism*; at: www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/policy/gcpospaper.html
- Enloe, C. (2007). *Globalization and militarism: Feminists make the link*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Grant, R. and Newland, K. (eds) (1991) *Gender and International Relations* (London).
- Halliday, F. (1983) *The Making of the Second Cold War* (London). ——— (1988a) *Three Concepts of Internationalism*, *International Affairs*, ——— (1988b) *Hidden from International Relations: Women and the International Arena*, *Millennium*, 17(3).
- Hill, C. J. (1999) 'Where are we Going? *International Relations, the Voice from Below*', *Review of*

- International Studies, 25(1).
- J. Ann Tickner, *Gendering World Politics*, New York: Columbia University Press, 2001; Christine Sylvester, *Feminist International Relations: An Unfinished Journey*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Mahathir, cited in Mike Smith, *Australia's National Security into the Twenty-First Century: Rethinking Strategic Direction* (Canberra: ANU Strategic and Defence Studies Centre, 1997).
- Moghadam, V. (2007). *Peace building and reconstruction with women: Reflections on Afghanistan, Iraq, and Palestine*. In V. Moghadam (Ed.), *From patriarchy to empowerment: Women's participation, movements, and rights in the Middle East, North Africa, and South Asia* Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Newland, K. (1988) *From Transnational Relationships to International Relations: Women in Development and the International Decade for Women*, Millennium, 17(3).
- Peters, J. and Wolper, A. (eds) (1995) *Women's Rights/Human Rights: International Feminist Perspectives* (New York).
- Peter Stoett, (1999). *Human and Global Security: An Exploration of Terms*, Toronto: University of Toronto Press.
- Piper, Nicola and Anders Uhlin, eds. (2004), *Transnational Activism in Asia: Problems of Power and Democracy*, London: Routledge.
- Risse-Kappen, Thomas ed. (1995), *Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sakiko Fukuda-Parr. (2003) *The new threats to human security in the era of globalization,* in Lincoln Chen, Sakiko Fukuda-Parr and Ellen Seidensticker, *Human Insecurity in a Global World*, Global Equity Initiative, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Steuernagel, G. A. (1990) *Men do not do Housework! The Image of Women in Political Science*, in M. Paludi and G. Steuernagel (eds), *Foundations for a Feminist Restructuring of the Academic Disciplines* (New York).
- Stienstra, D. (1994) *Women's Movements and International Organizations* (Toronto).
- Tantiwiramanond, D. and Pandey, S. R. (1991), *By Women, For Women: A Study of Women's Organizations in Thailand*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Tarrow, Sidney, (2005). *The New Transnational Activism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994) *Human Development Report 1994 – New Dimensions of Human Security*, New York: Oxford University Press.
- Wieringa, Saskia Eleonora, Ed, (1988) *Women's Struggle and Strategies*, Gower Publishing Company Limited.
- Withaya Sucharithanarugse, *The Concept of "Human Security" Extended: "Asianizing" the Paradigm'*, in Tow et al. (eds), *Asia's Emerging Regional Order*.
- Statement by Surin Pitsuwan, Foreign Minister of Thailand, at the 55th Session of the UN General

Assembly (19 September 2000).

Jurnal

- Brah, Avtar and Ann Phoenix (2004) *Ain't I a Woman? Revisiting Intersectionality*, Journal of International Women's Studies 5(3): 75–86.
- Brubaker, Rogers and Frederick Cooper (2000) *Beyond Identity*, Theory and Society 29(1): hlm. 34–67.
- Crenshaw, Kimberlé (1989) 'Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics', University of Chicago Legal Forum 138–67.
- Della Porta, Donatella and Sidney Tarrow. (2005). *Introduction: Transnational Processes and Social Activism: An Introduction*, in *Transnational Protest and Global Activism*, eds. Donatella Della Porta and Sidney Tarrow. Lanham: Rowman & Littlefield: 1- 17.
- Garcia, D. (2015) *Humanitarian security regimes*. International Affairs, 91 (1): 55–75.
- Greenwood, M. T., & Waever, O. (2013) *Copenhagen-Cairo on a roundtrip: A security theory meets the revolution*. Security Dialogue, 44 (5–6): 485–506.
- Gillian Youngs (2004) *Feminist international relations: a contradiction in terms? Or: Why women and gender are essential to understanding the world we live in*, International Affairs, 80, 1, hlm. 75–87.
- Glasius, M. (2008) *Human Security from Paradigm Shift to Operationalization: Job Description for a Human Security Worker*. Security Dialogue, 39 (1): 31–54.
- Kevane, Michael and David I Levine. (2003) *Changing Status of Daughters in Indonesia*," In Center for International and Development Economics Research. Center for International and Kishor, Sunita and Johnson, Kiersten. 2006. "Reproductive Health and Domestic Violence: Are the Poorest Women Uniquely Disadvantaged?" Demography, 43 (2), pp. 293- 307
- Loh, Francis K.W. (2005). *National Security, the Police and the Rule of Law: Militarisation by Other Means*. Asian Exchange, (Special issue on Militarising State, Society and Culture in Asia: Critical Perspectives), 20 (2) & 21 (1): hlm.179-208.----- 2004, "Les ONG et les mouvements sociaux en Asie du Sud-Est." Mondialisation desrésistances : l'état des luttes 2004, ed. Laurent Delcourt, Bernard Duferme, and François Polet. Paris, Éditions Syllepse : hlm. 41-55.
- Siegmann, Kartin A. (2006) *Globalisation, Gender, and Equity - Effects of Foreign Direct Investment on Labour Markets in Rural Indonesia*. Journal of Economics, 3(1), pp. 113 - 30.
- Sobritchea, Carolyn I. (2004) *Women's Movement in the Philippines and the Politics of Critical Collaboration with the State*, In Civil Society in Southeast Asia, ed. L. H. Guan, 101 – 21. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Wolfers, A. (1962). The actors in international politics. Discord and Collaboration: Essays on International Politics, 3–24.